

Analisis Tata Kelola Dan Manajemen Keuangan, Serta Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Panti Asuhan (*Studi Kasus: Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo*)

Agum Presiawan Tubuon¹, Syabrina Syarief², Airin Pakaya³,
Fauzan Abas⁴, Nazwa Kantu⁵, Nelviyani⁶

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

atubuon12@gmail.com, syabrinasyarief@gmail.com, airinpakaya@gmail.com,
fauzanabas@gmail.com, nazwankantu@gmail.com, nelviyani@gmail.com;

ABSTRAK

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Keberlanjutan layanan panti asuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, manajemen keuangan, serta dukungan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola, manajemen keuangan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap pimpinan panti, bendahara, dan pengasuh senior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola panti masih bersifat personalistik dengan ketergantungan tinggi pada peran pimpinan panti. Manajemen keuangan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan belum didukung oleh perencanaan keuangan jangka panjang serta dana cadangan. Sementara itu, peran pemerintah lebih dominan dalam aspek regulasi dan administratif melalui persyaratan legalitas dan akreditasi, namun pendampingan kelembagaan masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan, perencanaan keuangan yang berkelanjutan, serta peran pemerintah yang lebih fasilitatif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan panti asuhan sebagai bagian dari layanan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Panti Asuhan, Peran Pemerintah, Tata Kelola.

ABSTRACT

Orphanages are social welfare institutions that play a strategic role in fulfilling children's rights and well-being. The sustainability of orphanage services is strongly influenced by institutional governance, financial management, and government support. This study aims to analyze governance practices, financial management, and the role of government in the management of Darul Mutmain Orphanage in Gorontalo. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with the orphanage director, treasurer, and senior caregivers. The findings indicate that the governance system remains highly personalized, with strong dependence on the role of the orphanage leader. Financial management is primarily oriented toward short-term operational needs and lacks long-term financial planning and reserve funds. Furthermore, the government's role is mainly regulatory and administrative, particularly through legal and accreditation requirements, while institutional mentoring remains limited. This study concludes that strengthening institutional governance, developing sustainable financial planning, and enhancing a more facilitative role of government are essential to improving the management quality of orphanages as part of social welfare services.

Keywords: Financial Management, Government Role, Governance, Orphanage.

PENDAHULUAN

Tata kelola (*governance*) merupakan seperangkat proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan bertanggung jawab [1]; [2]. [3] menjelaskan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai oleh prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, panti asuhan merupakan salah satu bentuk lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan sosial, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pembinaan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak yatim, piatu, dan anak terlantar [4]. Keberadaan panti asuhan tidak hanya dimaknai sebagai tempat tinggal sementara, melainkan sebagai institusi sosial yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, panti asuhan menjadi bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, lembaga sosial seperti panti asuhan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dari donatur, masyarakat, dan pemerintah [3]; [5]; [6], [7]. Tata kelola yang lemah dapat berdampak pada rendahnya efektivitas organisasi, ketidakjelasan pembagian tugas, serta minimnya pengawasan internal dalam pengelolaan lembaga.

Salah satu aspek krusial dalam tata kelola panti asuhan adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada lembaga sosial mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, serta pengawasan penggunaan dana secara sistematis [8]. Berbeda dengan organisasi yang berorientasi laba, panti asuhan umumnya bergantung pada sumber dana eksternal seperti donasi masyarakat, bantuan pihak swasta, serta dukungan pemerintah. Ketergantungan pada sumber dana yang tidak selalu bersifat tetap menjadikan pengelolaan keuangan panti asuhan rentan terhadap ketidakpastian, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kondisi tersebut juga tercermin pada pengelolaan panti asuhan di daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo. Salah satu panti asuhan yang berperan aktif dalam memberikan layanan pengasuhan anak adalah Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo. Dalam menjalankan fungsi pengasuhan, panti ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian anak asuh, seperti biaya pendidikan, konsumsi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Tingginya kebutuhan operasional yang harus dipenuhi secara berkelanjutan menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang terencana dan adaptif terhadap kondisi pendanaan yang fluktuatif.

Selain faktor internal, peran pemerintah juga memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan panti asuhan sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial. Pemerintah, melalui dinas sosial, bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberian bantuan sosial kepada lembaga kesejahteraan sosial, termasuk panti asuhan. Dukungan pemerintah tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga meliputi fasilitasi perizinan, akreditasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan [9]. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap dukungan tersebut sering

kali bergantung pada kelengkapan administrasi dan kepatuhan panti asuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tata kelola kelembagaan, manajemen keuangan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap pimpinan panti, bendahara, dan pengasuh senior guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan panti asuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik tata kelola kelembagaan, manajemen keuangan, serta peran pemerintah dalam pengelolaan panti asuhan berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara kontekstual dan komprehensif sesuai dengan kondisi lapangan [10]; [11], [12]. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi pengelolaan panti asuhan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti [13].

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo, Jl. Batu Doa, Moahudu, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa panti asuhan ini aktif menyelenggarakan layanan pengasuhan anak serta memiliki karakteristik pengelolaan yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, tata kelola organisasi, dan hubungan kelembagaan dengan pemerintah.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur digunakan karena bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika wawancara, sekaligus tetap berpedoman pada fokus permasalahan yang telah ditentukan [10]. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan panti, bendahara, dan pengasuh senior. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu: (1) manajemen keuangan dan keberlanjutan pendanaan panti asuhan; (2) tata kelola organisasi dan sistem administrasi panti asuhan; serta (3) peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan panti asuhan. Selain wawancara, data pendukung diperoleh melalui studi dokumentasi berupa profil panti asuhan, dokumen administrasi, dan arsip terkait pengelolaan panti asuhan guna memperkuat dan memvalidasi data hasil wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis yang dikemukakan oleh [14] berdasarkan perspektif Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Data hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik tata kelola, manajemen keuangan, serta peran pemerintah dalam pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan terhadap pimpinan panti, bendahara, dan pengasuh senior Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo, diperoleh gambaran mengenai tiga aspek utama pengelolaan panti asuhan, yaitu tata kelola kelembagaan, manajemen

keuangan, dan peran pemerintah. Temuan lapangan menunjukkan adanya pola pengelolaan yang bersifat personalistik, keterbatasan perencanaan keuangan jangka panjang, serta peran pemerintah yang lebih dominan dalam aspek regulatif dan administratif.

Pembahasan

Tata Kelola Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo

Tata kelola Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo menunjukkan pola pengelolaan yang sangat bergantung pada peran pimpinan panti. Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan panti tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga keberlangsungan lembaga, termasuk ketika terjadi krisis pendanaan. Informan menyatakan bahwa ketika donasi tidak mencukupi, kekurangan anggaran ditangani langsung oleh ketua panti, bahkan dengan menggunakan aset pribadi (Wawancara dengan A.K., 2026).

Kondisi ini mencerminkan tata kelola yang bersifat personalistik, di mana stabilitas lembaga sangat ditentukan oleh kapasitas individu pimpinan. Dalam perspektif teori tata kelola, praktik ini menunjukkan adanya akuntabilitas berbasis kepercayaan, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. [3] menegaskan bahwa tata kelola yang baik menuntut pembagian peran yang jelas, sistem pengawasan, serta mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan, bukan semata bertumpu pada figur pemimpin. Hal ini sejalan dengan pandangan [15] yang menekankan pentingnya pelebagaan nilai-nilai *good governance* dalam organisasi publik dan sosial. Studi [16] pada organisasi nirlaba menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten memungkinkan lembaga berkembang dan memperoleh kepercayaan publik, sehingga pola tata kelola yang masih bertumpu pada figur pimpinan perlu terus diarahkan menuju sistem kelembagaan yang lebih melembaga.

Hasil wawancara juga mengungkap pengalaman ketika panti sempat dikelola oleh pihak lain yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai tata kelola panti asuhan. Dalam periode tersebut, kebutuhan dasar anak-anak tidak terpenuhi secara optimal, bahkan anak asuh mengalami keterlambatan dalam memperoleh makanan (Wawancara dengan A.K., 2025). Peristiwa ini menegaskan bahwa tata kelola panti asuhan tidak dapat disamakan dengan pengelolaan lembaga pemerintahan desa, karena panti asuhan berada di bawah naungan Dinas Sosial dan memiliki karakteristik pelayanan sosial yang khas.

Meskipun demikian, pengelola panti telah berupaya membangun tata kelola formal melalui pemenuhan aspek legalitas, seperti akta notaris, izin operasional, serta akreditasi dari Kementerian Sosial. Upaya ini sejalan dengan pandangan [15] yang menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang baik.

Manajemen Keuangan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo

Manajemen keuangan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo didominasi oleh pendekatan jangka pendek dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan harian anak asuh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama panti berasal dari donatur tetap, sumbangan masyarakat, serta bantuan pemerintah daerah. Namun, jumlah donatur tetap sangat terbatas dan nilainya relatif kecil, sehingga belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional panti (Wawancara dengan A.K., 2026).

Informan menjelaskan bahwa panti belum memiliki perencanaan keuangan jangka panjang maupun dana cadangan. Setiap dana yang masuk umumnya langsung digunakan untuk biaya pendidikan, konsumsi, dan kebutuhan anak asuh lainnya. Biaya pendidikan anak-anak dalam satu hari dapat mencapai jumlah yang cukup besar, sehingga hampir tidak

memungkinkan adanya simpanan jangka panjang (Wawancara dengan A.K., 2026). Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi perencanaan keuangan dalam pengelolaan panti.

Menurut [8], tata kelola keuangan sektor publik dan sosial yang baik harus mengintegrasikan siklus perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas pelaporan keuangan secara sistematis. Ketidadaan perencanaan jangka panjang menyebabkan panti berada dalam kondisi rentan ketika terjadi penurunan donasi atau keterlambatan bantuan pemerintah. Pola serupa juga ditemukan oleh [17] pada panti asuhan lain di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perolehan dana dari donatur dan pengajuan proposal kepada pemerintah daerah umumnya tidak disertai kepastian waktu maupun jumlah, sehingga pengelola panti dituntut menyusun perencanaan dan pelaporan keuangan yang tertib agar keberlangsungan layanan tetap terjaga.

Dalam menghadapi risiko penurunan pendanaan, strategi yang diterapkan panti bersifat adaptif dan informal. Pimpinan panti menjadi penanggung jawab utama dalam menutup kekurangan dana, baik melalui jaringan pribadi maupun sumber daya yang dimiliki. Selain itu, panti juga sangat bergantung pada momen-momen keagamaan dan sosial, seperti bulan Ramadan dan peringatan hari besar Islam, di mana donasi masyarakat cenderung meningkat (Wawancara dengan A.K., 2026). Meskipun strategi ini membantu keberlangsungan jangka pendek, [18] menegaskan bahwa keberlanjutan organisasi nirlaba idealnya tidak bergantung pada sumber dana insidental, melainkan pada perencanaan strategis dan diversifikasi pendanaan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian [19] pada panti asuhan di Singaraja, yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan justru menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan donatur di tengah keterbatasan sumber pendanaan tetap.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo

Peran pemerintah dalam pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo terlihat terutama melalui fungsi regulasi dan pemberian bantuan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan pemerintah hanya dapat diperoleh apabila panti memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti legalitas lembaga, izin operasional, pendaftaran di dinas sosial kabupaten, serta akreditasi dari Kementerian Sosial (Wawancara dengan A.K., 2026).

Informan menegaskan bahwa kelengkapan administrasi menjadi faktor penentu utama dalam pencairan bantuan. Ketidaklengkapan satu dokumen saja dapat menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan (Wawancara dengan A.K., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah lebih menekankan aspek kepatuhan administratif dibandingkan pendampingan manajerial secara langsung.

Kondisi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 yang mengatur standar nasional pengasuhan anak dan menempatkan akreditasi sebagai instrumen pengawasan kualitas lembaga kesejahteraan sosial. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kompleksitas persyaratan administratif menjadi tantangan tersendiri bagi panti asuhan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat hasil penelitian [20] mengenai peran dinas sosial dalam pembinaan anak terlantar, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah masih lebih menonjol pada fungsi teknis-administratif seperti pendataan dan penetapan persyaratan, dibandingkan pendampingan langsung yang berkelanjutan terhadap lembaga pengasuhan.

[15] menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pelayanan publik seharusnya tidak

hanya bersifat regulatif dan kontrol, tetapi juga fasilitatif. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan agar panti asuhan mampu memenuhi standar tersebut secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola, manajemen keuangan, dan peran pemerintah dalam pengelolaan Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo, dapat disimpulkan tiga hal pokok sebagai berikut. Pertama, dari aspek tata kelola, pengelolaan panti asuhan masih sangat bergantung pada peran pimpinan panti sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan penjaga keberlanjutan lembaga. Pola tata kelola yang bersifat personalistik ini memungkinkan panti bertahan dalam kondisi keterbatasan sumber daya, namun sekaligus menimbulkan risiko keberlanjutan apabila tidak diimbangi dengan penguatan sistem kelembagaan, pembagian peran yang jelas, serta tata kelola yang lebih partisipatif.

Kedua, dari aspek manajemen keuangan, Panti Asuhan Darul Mutmain Gorontalo belum memiliki perencanaan keuangan jangka panjang dan dana cadangan. Pengelolaan keuangan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek dengan ketergantungan yang tinggi pada donasi masyarakat dan bantuan pemerintah. Meskipun pengelola menunjukkan kemampuan adaptif dalam menghadapi fluktuasi pendanaan, kondisi ini membuat panti rentan terhadap ketidakstabilan keuangan, terutama ketika terjadi penurunan donasi.

Ketiga, dari aspek peran pemerintah, dukungan pemerintah terhadap panti asuhan terutama diwujudkan melalui regulasi, pengawasan, dan pemberian bantuan sosial yang berbasis pada pemenuhan persyaratan administratif dan akreditasi. Peran ini penting dalam menjamin standar pengasuhan anak, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan pendampingan kelembagaan dan manajerial yang memadai. Akibatnya, panti asuhan dengan keterbatasan sumber daya administrasi menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan panti asuhan tidak hanya ditentukan oleh komitmen pengelola, tetapi juga oleh kekuatan tata kelola kelembagaan, efektivitas manajemen keuangan, serta peran pemerintah yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga fasilitatif. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola dan manajemen keuangan, serta peningkatan pendampingan dari pemerintah, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan panti asuhan sebagai bagian dari layanan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Ansell and A. Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *J. Public Adm. Res. Theory*, 2008.
- [2] H. C. Sotelisa and D. Puturuhi, "Penerapan Prinsip New Publik Service dalam Pelayanan STNK pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap," *Public Policy*, vol. 2, no. 2, pp. 315–330, 2021, doi: 10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p315-330.
- [3] W. S. Zahran, A. Terada, and J. Saengsroi, "Implementation of Good Governance Principles in Improving Public Services : A Case Study of the Ministry of Education and Culture," vol. 4, no. 1, pp. 119–131, 2023.
- [4] F. Fitriyani and I. O. Siagian, "Kesehatan Mental di Kalangan Remaja Panti Asuhan," *J. Keperawatan Jiwa*, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/14851>

- [5] K. Hasan, R. Mokodongan, and M. Djaba, "Integrasi Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja dalam Praktik Manajemen Kinerja Pegawai," *J. Manaj. Keuang. Sekt. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 31–43, 2025.
- [6] F. Akibun, J. P. Biki, F. M. Timbert, and F. H. Latala, "Pengaruh SPI, SIA, dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Perspektif Pemangku Kepentingan," *J. Manaj. Keuang. Sekt. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2025.
- [7] H. P. Nento, R. D. Lahasan, and T. A. Salim, "PENGARUH MANAJEMEN RESIKO TERHADAP STABILITAS KEUANGAN USAHA UMKM DALAM SITUASI EKONOMI YANG TIDAK MENENTU," *J. Manaj. Keuang. Sekt. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2025.
- [8] R. Manalu, "Integrasi Tata Kelola Keuangan Sektor Publik: Analisis Strategis Perencanaan, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah," 2026, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6009>.
- [9] KEMENSOS RI, "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30 / HUK / 2011," 2011.
- [10] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kaji. Ilm. mata kuliah umum*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021.
- [11] J. W. Creswell, "Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed," 2012.
- [12] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.
- [13] M. Aliati, N. L. Ramadani, and N. H. Syahira, "Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial," vol. 5, no. 4, 2025, doi: 10.59818/jpi.v5i4.1759.
- [14] Qomaruddin and H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.
- [15] N. S. Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *J. Ilmu Polit. dan Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–18, 2016, doi: 10.31845/jwk.v2i2.133.
- [16] L. Qomariyah and E. Sulistyowati, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)," 2022.
- [17] A. Karim, "Pengelolaan Dana Donasi di Panti Asuhan Be r kah Palangka Raya," vol. 4, no. 2, 2024.
- [18] K. Andhityawati and G. Darma, "Faktor Kunci Keberlanjutan Organisasi Nirlaba di Bali Kadek Wahyuni Andhityawati (1) Gede Sri Darma (2)," vol. 19, no. 2, pp. 233–259, 2022.
- [19] L. G. R. U. Agustin, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PANTI ASUHAN (STUDI PADA PSAA UDYANA WIGUNA SINGARAJA) TAHUN 2016," vol. 10, no. 2, pp. 408–417, 2018.
- [20] A. Mugopar, "Peran dinas sosial terhadap pembinaan anak terlantar melalui program usaha ekonomi produktif di kabupaten bandung 1," vol. 7, no. November, pp. 82–92, 2023.